

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di tengah kekayaan sumber daya alam (SDA) yang sangat berlimpah dan potensi pariwisatanya besar, Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan salah satunya masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu permasalahan di Indonesia yang sangat kompleks dan bersifat multidimensi. Kemiskinan secara harfiah dapat diartikan sebagai situasi di mana seseorang tidak mampu mencapai tingkat kesejahteraan rata-rata di daerah tersebut, baik dari segi pendapatan maupun pemenuhan kebutuhan pokok sebuah keluarga. Masalah kemiskinan yang setiap tahunnya terus berfluktuasi (mengalami naik turun) dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap sektor ekonomi, sosial, dan politik bagi seluruh bangsa Indonesia. Tidak hanya mempengaruhi sektor ekonomi, sosial, dan politiknya, kemiskinan ini juga dapat mempengaruhi standar pendidikan dan standar kesehatan masyarakat.

Berdasarkan informasi survei yang dicatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa selama periode Maret 2022 angka kemiskinan di Indonesia mencapai 9,54% dari seluruh penduduk Indonesia atau sekitar 26,16 juta orang dan 0,17% atau sekitar 0,34 juta jiwa mengalami penurunan di bulan September 2021. Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Jawa Tengah, tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 sekitar 3,83 juta jiwa atau 10,93%. Tingkat kemiskinan cenderung lebih tinggi di daerah pedesaan daripada di daerah perkotaan. Sejak bulan September 2021 hingga Maret 2022, tingkat kemiskinan turun sebesar 0,24% di wilayah perkotaan, sedangkan di wilayah pedesaan turun sebesar 0,40%. Demikian pula, periode dari Maret 2021 hingga Maret 2022 mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,66% dan 1,03% di daerah perkotaan dan pedesaan.¹

¹ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Maret 2022 (Semarang: Badan Pusat Statistik, 2022), <https://jateng.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/1381/persentase-penduduk->

Permasalahan kemiskinan termasuk dalam permasalahan utama yang harus dipecahkan, maka dari itu, perlu adanya upaya pengentasan kemiskinan secara komprehensif, terpadu, tepat sasaran serta tepat guna berdasarkan kebutuhan dan karakteristik masyarakat miskin. Pengentasan kemiskinan pada hakikatnya adalah suatu usaha merubah perilaku yang diawali dengan merubah pola pikir atau sikap individu dan masyarakat. Upaya pengurangan kemiskinan dapat dilakukan melalui kegiatan penguatan kepada masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat dituntut harus memiliki atau mengembangkan potensi mereka untuk menjadi Masyarakat mandiri melalui berbagai kegiatan pemberdayaan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Irmawati menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah metode yang sangat efektif dalam mengatasi kemiskinan dan memperluas partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan terkait kehormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar mereka. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya yang kuat untuk meningkatkan kemampuan individu dan kelompok dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, serta memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan secara mandiri dan independen.

Berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) dan Program Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk periode 2000 sampai 2004, dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mencapai pemberdayaan melalui penguatan lembaga masyarakat lokal dan perluasan organisasi, pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat, serta penguatan rasa percaya diri masyarakat untuk membantu meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial, dan politik mereka.²

Menurut penelitian Noor Rochman, mengungkapkan bahwa memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia dapat menjadi alternatif untuk memberdayakan masyarakat

[miskin-maret-2022-turun-0-32-persen-poin--menjadi-10-93-persen-dibanding-september-2021-yang-sebesar-11-25-persen-.html](#).

²Irmawati, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pelatihan Diversifikasi Produk Olahan Jagung Di Desa Tanah Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba," *Jurnal Publiciana*, (2018): 4.

khususnya masyarakat pedesaan agar terhindar dari rantai kemiskinan dan mampu meningkatkan taraf kehidupan. Sebenarnya, di era globalisasi saat ini, setiap orang di kota maupun di pedesaan harus mampu menghadapi tantangan untuk terus bersaing dengan kemajuan zaman. Pemanfaatan potensi sumber daya alam di sebuah desa dapat diimplementasikan melalui pengembangan pariwisata. Sumber daya budaya dan alam yang unik dapat menjadi aset dalam pengembangan produk pariwisata pedesaan.³

Menurut Anastasia dalam pengembangan pariwisata memerlukan pembentukan kebijakan yang memprioritaskan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan, seperti yang diuraikan dalam *Pasific Ministers Conference on Tourism and Environment di Maldivest* pada tahun 1997. Prinsip-prinsip ini mencakup kesejahteraan lokal, penciptaan lapangan kerja, konservasi sumber daya alam, pelestarian dan peningkatan kualitas hidup, dan kesetaraan antargenerasi dalam distribusi kesejahteraan.⁴ Pengembangan pariwisata dapat diimplementasikan di daerah pedesaan, seperti melalui pengembangan pariwisata desa. Hal ini memungkinkan masyarakat pedesaan untuk melakukan pemanfaatan terhadap potensi sumber daya alam dan budaya mereka, karena mereka ditandai dengan hubungan yang erat dengan lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata, Pasal 12 ayat 2 dan 3 menyatakan bahwa "Kawasan strategis pariwisata dikembangkan untuk berpartisipasi dalam membangun persatuan dan kesatuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu mempertimbangkan nilai-nilai budaya, sosial, dan keagamaan masyarakat."⁵ Terkait dengan pernyataan ini, penting untuk menekankan partisipasi

³ Noor Rochman, "Model Pengembangan Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Equilibria Pendidikan* 1, no. 1 (2016): 62.

⁴ Anastasia Murdiastuti, Hermanto Rohman, dan Suji, *Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berbasis Democratic Governance* (Surabaya: Buku Pustaka Radja, 2014), 74-75.

⁵ Undang-undang Republik Indonesia, "10 Tahun 2009, Kepariwisataaan," (26 November 2022).

masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat di sektor pemerintah lokal dan desa, sambil selalu mempertimbangkan aspek sosial dan budaya serta agama masyarakat setempat. Selain itu, hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa "Desa adalah satuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan inisiatif masyarakat, hak adat, dan/atau hak-hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem tata kelola Negara Kesatuan Republik Indonesia."⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Wahidin menyatakan bahwa *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO) mendorong Indonesia untuk lebih memaksimalkan pengembangan pariwisata pedesaan atau pariwisata desa. Pengembangan pariwisata desa tidak hanya menarik lebih banyak wisatawan tetapi juga mempengaruhi distribusi pembangunan yang merata di tingkat desa dan meningkatkan status ekonomi masyarakat. Selain itu, menurut Putra dan Pitana, menyatakan bahwa tujuan pengembangan pariwisata desa adalah untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengembangan pariwisata. Mengakui bahwa masyarakat, dengan budayanya, tidak hanya harus dilihat sebagai objek pariwisata tetapi juga memanfaatkan pariwisata sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan melestarikan nilai-nilai dan praktik budaya lokal untuk peningkatan diri, mereka bersedia melakukannya.⁷

Pengembangan pariwisata daerah pedesaan didukung oleh tiga faktor. Pertama, potensi yang dimiliki daerah pedesaan relatif lebih tinggi dalam hal sumber daya alam dan budaya dibandingkan dengan daerah perkotaan. Masyarakat pedesaan masih menjalankan tradisi budaya dan ritual tradisional, dan topografinya harmonis. Kedua, lingkungan fisik daerah pedesaan masih alami atau kurang tercemar dibandingkan

⁶ Undang-undang Republik Indonesia, "06 Tahun 2014, Desa," (26 November 2022)

⁷ Nur Wahidin, "Strategi Pengembangan Desa Wisata Gemawang Di Kabupaten Semarang,"(Skripsi, Universitas Diponegoro Semarang, 2017), 3.

dengan daerah perkotaan, karena belum terlalu terpengaruh oleh berbagai jenis polusi. Ketiga, karena perkembangan ekonomi di daerah pedesaan yang relatif lambat sampai pada tingkat tertentu, memaksimalkan potensi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat lokal adalah dasar yang masuk akal untuk pengembangan pariwisata pedesaan.⁸

Di zaman modern ini, para wisatawan semakin tertarik dengan daerah pedesaan yang menampilkan keindahan alam. Hal ini telah melahirkan konsep pariwisata baru yang dikenal sebagai "desa wisata". Desa wisata mengacu pada daerah pedesaan yang memiliki karakteristik dan fitur unik yang membuatnya menjadi tujuan wisata yang menarik, seperti lingkungan alam, tradisi dan budaya yang terjaga, kuliner lokal, sistem pertanian, dan sistem kekerabatan. Pengunjung ditawarkan pengalaman budaya yang beragam, keajaiban alam yang unik, dan karya kreatif di desa tersebut. Desa wisata kini merupakan salah satu program yang digagas oleh pemerintah Kabupaten Pati untuk mengatasi masalah kemiskinan yang semakin meningkat di masyarakat pedesaan dengan memanfaatkan dan mengembangkan potensi dan keunikan yang ada di setiap desa di Kabupaten Pati, sambil melibatkan partisipasi dan kemampuan masyarakat lokal dalam pelaksanaannya.

Salah satu desa tujuan wisata potensial di Kabupaten Pati adalah Desa Jrahi. Desa Jrahi adalah Desa Pancasila yang terletak di Kecamatan Gunung Wungkal, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Desa Pancasila adalah kawasan desa/kelurahan yang didambakan oleh masyarakat karena merupakan desa yang adil, makmur dan sejahtera dengan kerukunan yang kuat sehingga dianggap sebagai desa yang ideal. Selain itu, Desa Jrahi telah ditetapkan sebagai Desa Pariwisata Pancasila karena harmoni keagamaan yang beragam dan sumber daya alam yang melimpah, menjadikannya lokasi yang sangat baik untuk pengembangan pariwisata.

⁸ Anak Agung Istri Andayani, Edhi Martono, dan Muhamad Muhamad, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Penglipuran Bali)," *Jurnal Ketahanan Nasional* 23, no. 1 (2017): 2.

Terbentuknya desa wisata Pancasila Jrahi berawal dari kerukunan antara umat beragama yang sangat kental di Desa Jrahi, sehingga agama tidak pernah menjadi kendala dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada dasarnya, kerukunan di Desa Jrahi ini seperti terkandung dalam Pancasila yakni sila ketiga “Persatuan Indonesia” yang memiliki keterkaitan sangat erat dengan menyatukan keberagaman yang berada di Indonesia. Seluruh masyarakat Desa Jrahi, hidup berdampingan dan saling menghargai antar umat beragama baik dari agama Islam, Kristen, Buddha, maupun kepercayaan *saptadarma* yang dianut oleh beberapa penduduk setempat. Kemudian, Desa Jrahi resmi ditetapkan sebagai Desa Wisata Pancasila Jrahi pada tanggal 2 Desember 2020 oleh Bupati Kabupaten Pati.

Masyarakat di Desa Jrahi memainkan peran penting dalam pengembangan desa wisata. Selain itu, Kepala Desa Jrahi memberikan bimbingan dan dorongan terhadap berdirinya desa wisata tersebut. Pendirian desa wisata bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat dengan memberikan pelatihan di bidang pariwisata dan menciptakan peluang kerja bagi masyarakat desa. Hal ini memungkinkan seluruh anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan desa wisata. Desa Jrahi memiliki potensi pariwisata yang luas, termasuk wisata alam, budaya, dan buatan manusia. Wisatawan merasa nyaman dan menikmati masa tinggalnya apabila destinasi wisata tersebut mempunyai sarana dan prasarana yang berkembang dengan baik. Namun, hal ini berbeda dengan situasi di Desa Pariwisata Pancasila Jrahi, di mana sarana dan prasarananya belum tersedia secara maksimal. Sarana dan prasarana tersebut terbengkalai karena desa wisata Pancasila Jrahi mengalami pandemi selama dua setengah tahun. Jalan yang sempit dan berlubang di beberapa kawasan membuat wisatawan kesulitan mengakses objek wisata.

Keberlanjutan program Desa Wisata Pancasila Jrahi dan kegiatannya merupakan bentuk implementasi program pemerintah setempat dalam pembangunan desa dan didukung secara erat oleh pemerintah Desa Jrahi, masyarakat, dan sumber daya lokal. Strategi pengelolaan desa diperlukan untuk mengembangkan pariwisata desa, mengatasi hambatan yang ada, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga Desa Jrahi dapat berkembang menjadi desa wisata yang baik

dan berkontribusi pada pembangunan keseluruhan desa. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Strategi Pengembangan Desa Wisata Pancasila Di Desa Jrahi Kabupaten Pati Dalam Pemberdayaan Masyarakat”**.

B. Fokus Penelitian

Bedasarkan pemaparan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada strategi pengembangan Desa Wisata Pancasila di Desa Jrahi, Kabupaten Pati dalam pemberdayaan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menghindari perluasan pembahasan, sehingga memungkinkan peneliti untuk tetap lebih fokus, jelas, dan berfokus pada masalah utama, untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih mendalam. Oleh karena itu, peneliti telah menguraikan fokus penelitian menjadi tiga sub-fokus, yaitu strategi pengembangan desa wisata, partisipasi masyarakat, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan Desa Wisata Pancasila di Desa Jrahi, Kabupaten Pati, dalam pemberdayaan masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah didefinisikan sebagai pengajuan pertanyaan terhadap fenomena yang terjadi dalam konteks masalah yang sedang diteliti dari sudut pandang analisis masalah. Berdasarkan fokus penelitian dari permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, rumusan masalah yang dapat disajikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi Pengembangan Desa Wisata Pancasila Di Desa Jrahi, Kabupaten Pati, dalam Pemberdayaan Masyarakat?
2. Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Pancasila Di Desa Jrahi, Kabupaten Pati, dalam Pemberdayaan Masyarakat?
3. Bagaimana Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pengembangan Desa Wisata Pancasila Di Desa Jrahi, Kabupaten Pati, dalam Pemberdayaan Masyarakat?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan strategi pengembangan Desa Wisata Pancasila di Desa Jrahi, Kabupaten Pati, dalam pemberdayaan masyarakat.
2. Untuk mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Pancasila di Desa Jrahi, Kabupaten Pati, dalam pemberdayaan masyarakat.
3. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengembangan Desa Wisata Pancasila di Desa Jrahi, Kabupaten Pati, dalam pemberdayaan masyarakat.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pernyataan masalah dan tujuan penelitian yang diuraikan di atas, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dalam bidang pengembangan masyarakat Islam, manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang strategi pengembangan desa wisata dalam pemberdayaan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya di bidang pengembangan masyarakat Islam.

2. Secara Praktis

Manfaat secara praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata Pancasila di Desa Jrahi guna mengurangi kemiskinan yang ada.

b. Bagi Pengelola Desa Wisata

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi pengelola objek wisata Pancasila di

Desa Jrahi dalam pengambilan keputusan, serta sebagai refleksi dalam pengembangan dan perbaikan kebijakan terkait pengembangan desa wisata Pancasila di Desa Jrahi dalam pemberdayaan masyarakat. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi lembaga swadaya masyarakat dan swasta yang ingin berpartisipasi dalam membangun desa mandiri melalui desa wisata.

c. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat desa dengan memberikan gambaran tentang strategi pengembangan desa wisata Pancasila di Desa Jrahi dalam pemberdayaan masyarakat. Hal ini juga dapat menarik minat masyarakat untuk lebih terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Pancasila Jrahi.

d. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan konsep keilmuan peneliti tentang pemberdayaan masyarakat, khususnya terkait dengan strategi pengembangan Desa Wisata Pancasila Jrahi dalam pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini juga sebagai kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari lebih lanjut dan menerapkan teori-teori yang telah dipelajari oleh peneliti selama di bangku kuliah.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian adalah suatu gambaran keseluruhan penyusunan laporan skripsi secara sistematis untuk memudahkan pembaca memahami apa yang ada di dalamnya. Berikut ini merupakan sistematika penulisan laporan skripsi:

1. Bagian Awal

Bagian ini meliputi: halaman judul, halaman pengesahan ujian munaqosah, lembar persetujuan pembimbing skripsi, lembar pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi Arab-Latin, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar.

2. Bagian Isi

Bagian ini terdiri dari beberapa Bab yang saling berkaitan, diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang menjadi dasar dalam pembuatan penelitian skripsi ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini memberikan penjelasan mengenai teori-teori relevan yang menjadi landasan atau pedoman dalam penyusunan skripsi Strategi Pengembangan Desa Wisata Pancasila di Desa Jrahi Kabupaten Pati dalam pemberdayaan masyarakat, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir. Teori-teori tersebut meliputi desa wisata, strategi pengembangan desa wisata, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan desa wisata dalam pemberdayaan masyarakat,

BAB III METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian ini terdiri dari: jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memaparkan tentang deskripsi dari hasil penelitian, berupa gambaran singkat objek penelitian, deskripsi data penelitian yang berisi pemaparan data temuan di lapangan terkait Strategi Pengembangan Desa Wisata Pancasila Jrahi, dan analisis data penelitian yang membahas tentang Strategi Pengembangan Desa Wisata Pancasila Di Desa Jrahi Kabupaten Pati dalam Pemberdayaan Masyarakat.

BAB V PENUTUP

Pada bab penutup ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan terkait Strategi pengembangan desa wisata Pancasila di

Desa Jrahi Kabupaten Pati dalam pemberdayaan masyarakat, dan saran-saran bagi objek penelitian maupun penelitian selanjutnya.

3. Bagian Akhir

Bagian ini tersusun dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Lampiran tersebut meliputi transkrip wawancara, instrument penelitian, dokumentasi, dan daftar riwayat hidup.

